

SKRIPSI

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN
APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**ANITA. S
105730500514**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN
APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**ANITA. S
105730500514**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (s1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO

“Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjaknlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karna hidup hanyalah sekali. Ingat hanya kepada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”.

“Sesungguhnya sesudah kesusahan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Al-Insyirah: 6-8)

“kembagaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”.

(Confusiun)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang tua dan suami saya tercinta sebagai tanda bakti dan wujud terima kasih saya atas limpahan kasih sayang, doa yang tiada putus-putusnya, serta semua pengorbanan dan dukungan yang selama ini diberikan. Terimakasih Bapak Abd Majid, Ibu Alm Halimah dan Nasrullah telah mengantarkan saya sampai titik yang saya cita-citakan ini. Alhamdulillah!



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259gedungigra lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa".

Nama Mahasiswa : Anita. S

No. Stambuk : 105730500514

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan dosen penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari sabtu, 13 Oktober 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Andi Jama'an, SE.,Msi
NIDN : 09021166036

Mukminatid Ridwan, SE.,Msi
NIDN : 128 6841

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si.,Ak., CA
NBM. 1073428





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Anita S : 105730500514, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009 Tahun 2018 M, Tanggal 3 Shafar 1440 H / 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

04 Shafar 1440 H
Makassar, _____
13 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H. Abdul. Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Mahmud Nuhung SE., MM (.....)
2. Linda Arisanti Razak SE., M.Si, Ak, CA (.....)
3. Abdul Salam HB, SE.,M.Si. Ak. CA. CSP (.....)
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E.,M.M
NBM: 903 078





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. SultanAlauddin No.259 gedungigra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita, S
Stambuk : 105730500514
Program studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Anita, S

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak. CA
NBM: 1073428



ABSTRAK

Anita. S, 2018. Pengaruh Profesionalisme Dan pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. (Dibimbing oleh **Bapak Andi Jama'an Dan Ibu Mukminati Ridwan**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Tahun Keuangan Pemeintah Daerah Kabupaten Gowa 2018. Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Gowa, Jumlah sampel yang diambil sebanyak 32 orang yang bersedia menjadi Responden. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme (X_1) tidak berpengaruh tapi berkaitan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana nilai hitung $0.096 > 0.05$ dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana nilai hitung $0.000 < 0.05$ (5%).

Kata Kunci : Profesionalisme, Pengetahuan Aparat Inspektorat

ABSTRACT

Anita. S, 2018. *The influence of professionalism and knowledge of the inspectorate apparatus on the quality of the financial statements of the regional governments of gowa district. Essay. Economics and Business Faculty. Muhammadiyah University of Makassar. (Guided by: Father Andi Jama'an and Mother Mukminatid Ridwan).*

This study aims to determine (1) The influence of professionalism on the financial statements of gowa district. The year of the regional 2018. (2) Knowledge of the inspectorate apparatus on the quality of the financial statements of the regional governments of gowa regency, financial year 2018. The population of this study were civil servants of gowa district inspectorate, the number of samples taken were 32 people who were willing to become respondents. Data analysis techniques used in this study are classical assumption test and multiple linear regression analysis.

The result of this study indicate that professionalism has no effect but relates to the quality of local government financial reports where the calculated value is $0,096 > 0.05$ and the knowledge of the inspectorate staff on the quality of local government financial reports has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports where the value of $0.000 < 0.05$ (5%).

Key words : Professionalism, Knowledge of the Inspectorate Apparatus

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat dan hanya kepada-Nya pula aku memohon untuk di jauhkan dari rezeki yang haram. Dialah yang maha adil dan tiada keadilan kecuali berasal dari-Nya. Segala puji bagi-Nya atas segala anugrah yang telah di limpahkan kepada penulis dan penulis mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk mampu merangkai, mengungkapkan ide, gagasan serta menguak sebagian kecil ilmu Allah yang ada di dunia ini.

Salawat dan salam InsyaAllah tetap tercurah bagi pemimpin-pemimpin besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya hingga yang terakhir nanti.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak antara lain :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rasulong, SE.,MM
3. Ketua Jurusan Akuntansi, Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA
4. Dr.Andi Jamaan, SE.M,Si selaku pembimbing I dan Ibu Mukminati Ridwan, SE.M,Si selaku pembimbing II atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Teristimewah untuk kedua orangtuaku Abd.Majid dan Alm.Halimah, suamiku Nasrullah, penyemangatku Muh. Dirga Wiraputra, saudara-saudara dan kerabat lainnya,terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan do'a yang berlimpah yang selalu kalian berikan.

6. Sahabat-sahabatku, Nur Indah Kartikasari, Ulfa Dwi Shoalehah, Ayu Haslinda, Andi Riska Novianti, Dwi Puspa Sari, Andi Dwi Nurul Annisa, Risky setianingsih, Nur Fadillah Utami Alvad, yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus dan ikhlas kepada penulis.
7. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar pada khususnya yang telah mendidik dengan ilmu pengetahuan, baik yang langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah penulis terima bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan InsyaAllah akan dibalas dengan balasan yang terbaik nantinya, Aamiin. Penulis sangat menyadari bahwa pasti banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Makassar, Agustus 2018

Anita. S

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	x iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TinjauanTeori.....	6
1. Profesionalisme.....	6
2. Pengetahuan Aparat Inspektorat	9
3. LaporanKeuangan.....	12
4. Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Daerah).....	13
5. Pengelolaan Keuangan Daerah	15
6. Pembinaan atas SKPD.....	18

7. Review atas LKPD (Laporan Keuangan Daerah).....	20
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Konsep.....	26
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sample	28
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	28
E. Oprasional Variabel Penelitian	30
F. Tehnik Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	
A. GAMBARA N OBJEK PENELITIAN	38
1. Sejarah singkat Kantor Inspektorat	38
2. Visi dan Misi.....	38
3. Struktur Organisasi.....	39
4. Tugas dan Fungsi	40
B. HASIL PENELITIAN	58
C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	73
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Tinjauan Empiris	22
Tabel 1.2 Variabel & Indikator	32
Tabel1.3 Instrumen Pengukuran Variabel.....	33
Tabel 1.4 Demografi Responden.....	59
Tabel 1.5 Uji Validitas Profesionalisme (X_1).....	61
Table 1.6 Uji Validitas Aparat Inspektorat (X_2)	62
Table 1.7 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)	62
Table 1.8 Uji Realibilitas	64
Table 1.9 Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
Table 1.10 Coeffisient Uji-t.....	70
Table 1.11 Hasil Uji Statistik F	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	40
Gambar 1.3 Histogram.....	67
Gambar 1.4 Normal P-Plot.....	68
Gambar 1.5 Scatter Plot	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Persetujuan Izin Penelitian
3. Angket (Koesioner)
4. Tabulasi Data Responden
5. Hasil Uji Validitas
6. Hasil Uji Reabilitas
7. Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda
8. Hasil Uji Asumsi Klasik
9. Tabel Uji T
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang ini peran aparat Inspektorat penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Tugasnya adalah review dalam memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) telah disajikan dengan wajar, di luar dari tugas tersebut Aparat Inspektorat juga berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan agar kedepan tujuan pemerintah dapat tercapai.Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset,serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah adalah inspektorat daerah.Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah maupun tugas lain yang diberikan kepada daerah sehingga dalam tugasnya, inspektorat sama dengan auditor internal pada umumnya.Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang di awasi. Dengan demikian

auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang di awasi.

Tujuan utama Aparat Inspektorat adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Sector Pablik, yang mana berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada public dalam rangka pemenuhan hak public. Kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang diberikan akuntan public mengharuskan akuntan public memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya. Oleh karna itu, seorang auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas dan seorang auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan akan menurun ketika opini yang diberikan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun

2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut; pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan asset, serta bidang khusus
2. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja.
3. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat–Kabupaten
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
5. Inspektorat Kabupaten. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten dan Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan kelompok jabatan fungsional
6. Penyelenggaraan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah **“Apakah Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”**.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam pemerintahan daerah sebagai wujud kepedulian akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah terutama untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, literature-kepuustakaan, informasi dan pengetahuan bagi berbagai pihak dan dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Aparat Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung peranan aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan pembinaan guna mewujudkan *good goverance*. Sehingga aparat Inspektorat

diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

4. Bagi Aparat Pemerintahan

sebagai informasi serta masukan dalam mengevaluasi tugas aparat Inspektorat dalam melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan public (Dwiyanto, 2011:157). Dengan adanya profesionalisme berarti auditor telah menggunakan kemampuan dalam melaksanakan audit secara maksimal serta melaksanakan pekerjaan dengan etika yang tinggi.

Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan (Siagian, 2009).

Untuk dapat mewujudkan profesionalisme, aparat Inspektorat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama harus mempunyai (Dwiyanto, 2011):

- 1) Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya,
- 2) Perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan loyal,
- 3) Kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan,

- 4) Kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama, dan
- 5) Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalismenya, aparat Inspektorat harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Selain itu perlu memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik. Dalam mempertahankan profesionalismenya, aparat Inspektorat harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan, tidak berpihak, bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan serta bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesionalismenya dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya (Standar Pemeriksa Keuangan Negara, 2007).

Profesionalisme dapat dicerminkan kedalam lima hal, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban social, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi (Mardiasmo, 2011)

- 1) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi merupakan suatu sikap yang teguh untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan kecakapan yang dimiliki.

2) Pemenuhan kewajiban social

Pemenuhan kewajiban social merupakan suatu paradigmen mengenai pentingnya peranan sebuah profesi dan manfaat yang didapat, baik oleh masyarakat maupun kalangan profesional lainnya karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Sikap kemandirian

Sikap kemandirian adalah suatu sikap dari seseorang yang profesional yang dapat membuat sebuah keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

4) Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi merupakan suatu kepercayaan bahwa yang paling berhak menilai bahwa suatu pekerjaan dianggap profesional atau tidak adalah rekan seprofesi atau yang mempunyai kompetensi yang sama dalam bidang ilmu atau pekerjaan tersebut.

5) Kualitas hubungan dengan sesama profesi

Kualitas hubungan dengan sesama profesi dapat terbentuk baik melalui organisasi formal maupun dalam kelompok kolega sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Pengetahuan Aparat Inspektorat

Peran aparat Inspektorat adalah untuk memastikan bahwa system akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar. Selain itu adalah untuk membantu kepala daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum. Aparat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya (Widjaja, 2013).

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan (Widjaja, 2013).

Pengawasan dalam hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang kebijakan "pengawasan" di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan "Daerah" tahun 2012 pada point menetapkan perumusan "peran" dari "Inspektorat Daerah" Kabupaten/Kota yaitu melakukan :

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di “daerah” kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan “pengawasan” di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan “daerah” kabupaten/kota.
- 2) “Pengawasan” pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup :
 - a. Pengawasan pada pemerintah desa
 - b. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantu di kabupaten/kota
 - c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- 3) Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan desa.

Tujuan dari pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (Widjaja, 2013).

Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan daerah adalah sebuah penilaian secara sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Aparat Inspektorat terhadap operasi, pengelolaan resiko dan system pengendalian dalam instansi pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan, apakah (Widjaja, 2013):

- 1) Keuangan Negara telah dikelola secara ekonomis dan efisien serta mendorong tercapainya tujuan Negara secara efektif.
- 2) Seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai system, prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

- 3) Pelaporan keuangan dan kinerja telah disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- 4) Terwujudnya pelayanan public kepada masyarakat, yang kesemuanya dilakukan untuk dikonsultasikan dengan pimpinan Negara/ daerah dan para pejabat public terkait agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program.

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman, tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah (Murhani, 2011) :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Pengawasan yang efektif (Murhani, 2011) yaitu :

- 1) Ada unsure keakuran, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.

- 2) Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
- 3) Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
- 4) Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- 5) Realisas secara ekonomis, dimana biaya system pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihaak yang berkepentingan (Hery, 2015:3-4)

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan (Zaki Baridwan:17).

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan rentang tujuan laporan keuangan yang isinya: "Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hery, 2015:4).

Fokus utama dari pelaporan keuangan adalah laba, dan informasi mengenai laba merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dimasa yang akan datang. Laporan arus kas dibutuhkan karna (Hery, 2015:10)

- 1) Kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.
- 2) Seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh lewat laporan ini.
- 3) Dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan dimasa mendatang.

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam pemerintahan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keahlian dan kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan, agar masyarakat juga sejahtera karena pembangunan untuk masyarakat bisa lancer (Suarjono, 2014).

Kriteria kualitas laporan keuangan mengarah pada informasi yang dihasilkan akan memberikan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik-keputusan, diantaranya adalah (Suwardjono, 2014 : 164-177) :

- 1) Relevan; kemampuan informasi dalam membantu pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu

dalam ketersediaannya untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

- 2) Andal ; kemampuan informasi untuk memberi keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketepatan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang diukur).
- 3) Dapat dibandingkan ; kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.
- 4) Taat asas ; mengikuti standar atau metode yang sama dari periode ke periode berikutnya.
- 5) Netral ; ketidakberpihakan dan tidak bertindak sesuai keinginan pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu.

Dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pun disebutkn bahwa LKPD seharusnya dapat menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mempunyai peranan prediktif dan prospektif alam memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan dan sumber daya yang dihasilkan dari oprasi yang berkelanjutan. Selain itu dapat menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas, relevan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait (Suwarjono, 2014).

Maka jelas peranan aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Aparat Inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal (Widjaja, 2014).

Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo:2009)

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumbuh pada kepentingan publik (*public oriented*).
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.

- 5) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggar multi tahunan.
- 6) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negaradan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuaangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurut Widjaja (2014 : 152-153) Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah tersebut mengatur tentang:

- 1) Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD
- 2) Kewenangan keuangan kepala daerah dan APBD
- 3) Prinsip-prinsip pengelolaan kas

- 4) Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan
- 5) Tata cara pengadaan barang dan jasa
- 6) Prosedur melakukan pinjaman daerah
- 7) Prosedur pertanggungjawaban keuangan
- 8) Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah dimana merupakan perwujudan dari rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah, selain berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku juga berdasarkan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah, dan
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan:

- 1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
- 2) Setiap anggaran daerah yang dibuat/ disusun diusahakan berdasarkan pada perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
- 3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur serta memudahkan untuk melakukan pengawasan.

- 4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju Pemerintah Daerah.
- 5) Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

6. Pembinaan atas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Manusia sebagai anggota merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, karna maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada unsur manusia sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karna itu perlu adanya pembinaan agar apa yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan (Moenir, 2009).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Moenir,2009).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa pembinaan pegawai perlu dilakukan baik untuk pegawai yang sudah lama maupun pegawai yang baru bekerja, karna pembinaan tersebut merupakan tugas seorang pemimpin dalam usaha untuk menggerakkan

para bawahan agar mereka dapat dan mau bekerja dengan baik (Moenir, 2009).

Untuk menjaga agar tetap terdapat keseimbangan antara kemampuan kerja pegawai dalam kelangsungan hidup organisasi diperlukan adanya tehnik-tehnik pembinaan pegawai. Tehnik-tehnik pembinaan pegawai adalah (Moenir, 2009)

- 1) Pengembangan pegawai, ialah suatu usaha yang ditunjukkan untuk memajukan pegawai baik dari segi karier maupun kemampuan.
- 2) Disiplin ialah usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan di suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui system pengaturan yang tepat.
- 3) Penghargaan ialah ucapan terima kasih seseorang yang telah berusaha bekerja semata-mata bukan untuk keperluan sendiri melainkan untuk keperluan orang lain.
- 4) Keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja.
- 5) Pemberian perangsang ialah benda atau hal lain yang immaterial yang menarik sehingga selalu menimbulkan kegairahan untuk mendapatkannya dan memilikinya.

Untuk mengukur keberhasilan pembinaan, dapat dilihat dari kinerja pegawai. Kinerja adalah "suatu kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja" (Budiharjo, 2011).

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator yang timbul dan yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Hal ini

sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Dwiyanto, 2008:50-51) mengenai indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Dan pada umumnya, dipahami sebagai ratio antara input dan output.
- 2) Kualitas layanan, maksudnya bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan.
- 3) Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Responsibilitas, maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan biokrasi baik yang eksplisit maupun yang implicit.
- 5) Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan biokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

7. Review atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi

dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan standard Akuntansi Pemerintahan (SAP). Review atas LKPD Pemerintah provinsi dilakukan oleh inspektorat provinsi sedangkan LKPD pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Inspektorat kabupaten/kota (Suwanda, 2017).

Review bisa dilaksanakan secara paralel dengan LKPD. Review paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. LKPD yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diajukan kepada kepala daerah dan sudah mengakomodasi hasil review Inspektorat. Review atas LKPD inilah yang nantinya ditujukan untuk menginformasikan kepada kepala daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerahnya (Suwanda, 2017).

Tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi

- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan review di lapangan dituntut beberapa persyaratan minimal sebagai berikut (Suwanda, 2017) :

- 1) Adanya kelembagaan yang mendukung kegiatan review yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 2) Kapasitas pelaksanaan review di lapangan yang dimiliki kompetensi di bidang pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- 3) Adanya dukungan system dan teknologi informasi yang memadai.

B. Tinjauan Empiris

Table 1.1 Tinjauan Empiris

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil
Resky alvino Subagjo (2013)	Pengaruh profesionalisme, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat inspektorat	Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan profesionalisme, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat inspektorat berpengaruh

	terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada inspektorat kabupaten dan kota se Eks Karesidenan Gerbang Kertausila).		positif signifikan pada variable yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Muh. Taufik Efendy (2010)	Pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah	Analisa regresi linear berganda Koesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variable independensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Rosmawati (2011)	Pengaruh kompetensi SDM dan peran auditor	Structural Equation Modeling	hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan

	internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota bandung		peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota bandung
Amrullah Doni (2011)	Pengaruh personal background, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik secara simultan maupun persial.	Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, <i>personalbackground</i> , pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan secara persial, <i>personal background</i> tidak berpengaruh terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

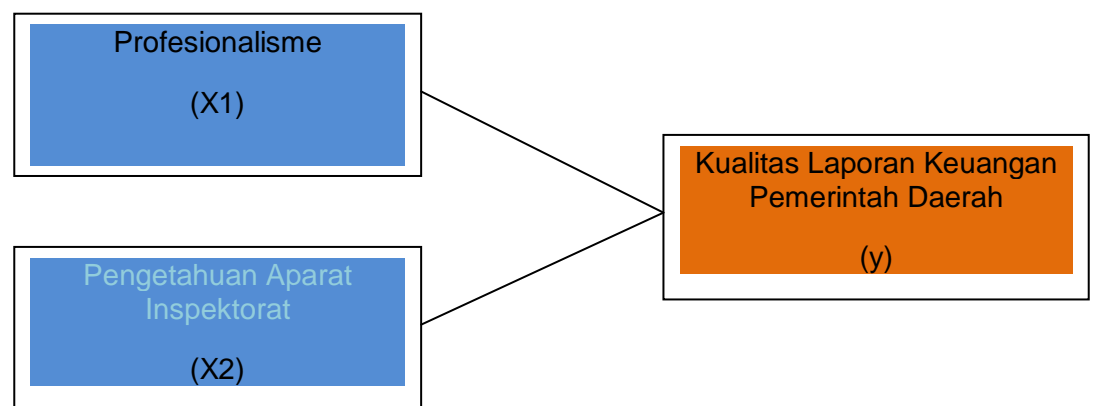
Rosmiala (2015)	Pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Kualitatif dan kuantitatif	Hal ini berarti profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat memberikan kontribusi sebesar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Puspita Sari (2012)	Pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah daerah se eks karesidenan basuki)	Kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah telah cukup baik dimiliki oleh aparat inspektorat dalam pelaksanaan kinerja review

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep menyatakan bahwa suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, begitu juga jika ada variabel yang menyertainya, maka peran variabel tersebut harus dijelaskan. Kerangka konsep perlu dikemukakan apabila penelitian menghubungkan dua peneliti atau lebih.

Berikut kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar I.I Kerangka Konsep



D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka hipotesis yang dapat diamati adalah diduga bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data berasal dari:

- a) Data *Primer*, yaitu data-data yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti, yaitu diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Aparat Inspektorat Kab. Gowa yang melakukan tugas pengawasan sebagai responden dalam penelitian ini.
- b) Data *Sekunder*, adalah sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang dimaksud yaitu seperti struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok aparat inspektorat dan Perda yang berlaku pada Inspektorat.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah profesionalisme aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki fungsional auditor dan Jabatan Pelaksana yang melakukan tugas pengawasan.

2. Sample

Sample dalam penelitian ini berjumlah 32 responden meliputi Inspektur, Sekretaris, Irbanwil I sampai Irbanwil IV, Jasubag Evaluasi Dan Pelaporan, Kasbug Adm Dan Umum, Kasbug Perencanaan, Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana. Penggunaan sample dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain : pertama, pegawai negeri sipil inspektorat gowa yang bekerja sebagai pegawai tetap lebih dari satu tahun. Kedua, pegawai yang bekerja dibidang fungsional auditor. Ketiga, pegawai dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan jabatan pelaksana.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data-data melalui penggabungan data yang akan ditulis berdasarkan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data primer dimana penulis dapat memperoleh data-data melalui penelitian secara langsung di tempat lokasi penelitian nanti dan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku ilmiah, ketentuan-ketentuan internasional, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber informasi yang dengan menggunakan cara :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka yaitu dengan mempelajari literatur-literatur baik berupa buku-buku atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penelitian yang dilakukan secara langsung berupa

-

wawancara atau kuisioner dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan materi yang terkait dengan penelitian ini adalah :

- a) Metode Observasi adalah melakukan pengumpulan data dengan melakukan peninjauan langsung pada Inspektorat Kab. Gowa
- b) Metode Dokumentasi adalah digunakan untuk memperoleh data mengenai dokumen yang akan digunakan dalam penelitian
- c) Metode kuisioner adalah suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam hal ini Aparat Inspektorat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada Responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan tersebut.

E. Oprasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat, variable dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan variable independennya terdiri dari Profesionalisme (X1) dan Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2). Definisi oprasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah :

1. Variabel Dependen

Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria kualitas laporan keuangan daerah (LKPD) dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dimana kriteria tersebut tersaji pada 5 pertanyaan sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

2. Variabel Independen

- a. Profesionalisme (X1) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Variabel ini akan tersaji pada 5 pertanyaan kuesioner sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu.

- b. Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2) yang dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang “Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009” Dimana kesemuanya itu tersaji dalam 5 pertanyaan kuesioner sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu merupakan metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu.

Tabel 1.2
Varibel Dan Indikator
Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya 2. Melaporkan hasil operasi 3. Melaporkan kondisi keuangan 4. Melaporkan sumber daya jangka panjang. 	Skala Likert
2	Profesionalisme (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi menyelesaikan pekerjaan 2. Bertanggungjawab dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan pekerjaan 3. Kemampuan untuk memfokuskan pada fakta-fakta yang relevan. 	Skala Likert
3	Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2)	Pengetahuan tentang Akuntansi dan auditing serta pengetahuan lainnya.	Skala Likert

Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala menggunakan tipe skala likert 5 point, skala likert ini ini berisi 5 (lima) tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (kurang setuju), 4 (setuju), 5 (sangat setuju).

Tabel 1.3

Instrumen Pengukuran Variabel

Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

F. Tehnik Analisis

Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan reabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsisten dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut benar-benar cocok untuk digunakan pada penelitian ini. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:152).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal

jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:147). Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,6.

c. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Dalam melakukan penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 alat uji, sebab data yang peneliti gunakan merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Pengujian asumsi klasik meliputi (Ghozali 2011) :

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable dependen (terikat) dan variable independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan normal probability plot. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal (Ghozali 2011:160). Terpenuhinya normalitas akan menjamin dapat di pertanggung jawabkan nya model analisis yang digunakan, sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat di pertanggung jawabkan.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dilihat dari gambar scatterplot, apabila ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Regresi yang baik bebas dari heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139).

2. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dimana analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali 2011:99).

Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana : X_1 = Profesionalisme

X_2 = Pengetahuan Aparat Inspektorat

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Nilai konstanta

b = Koefisien Variabel

e = Error

2. Uji F

Uji F (ANOVA) digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari Goodness of Fit suatu model (Ghozali, 2011:97). Pengukur hipotesis dapat dilakukan dengan cara berikut :

- 1) $H_0: \beta=0$, maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 2) $H_1: \beta \neq 0$, maka ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 3) Level of significant (α) sebesar 5%.
- 4) Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas):
 Jika probabilitas $>0,05$, maka H_0 tidak berhasil ditolak
 Jika probabilitas $<0,05$, maka H_0 berhasil ditolak.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 (5%), dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika terjadi sebaliknya, yaitu nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen (Ghozali, 2011:97). Pengujian hipotesis dapat menggunakan perbandingan antara t hitung dan t table dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Apabila t hitung $\geq t$ table maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independennya secara parsial mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.
- b. Apabila t hitung $\leq t$ table maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independennya secara parsial tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terletak di jalan Tumanurung Nomor 15 Sunggumisa, Kabupaten Gowa. Kantor Inspektorat Daerah berdiri sejak Tahun 1979 namun terkendala karna belum adanya pegawai sehingga baru beroperasi pada Tahun 1980.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Gowa adalah sesuatu yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yakni : “Terwujudnya pengawasan yang handal dalam peningkatan pelayanan prima aparatur pemerintahan Kabupaten Gowa”.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Gowa memiliki misi. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar Inspektorat Kabupaten Gowa dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Misi tersebut adalah :

- a. Mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah yang handal.
- b. Mendorong terciptanya aparatur Pemerintahan Kabupaten Gowa yang bersih, transparan dan akuntabel serta menghargai partisipasi masyarakat.

- c. Meningkatkan citra dan wibawa lembaga serta aparaturnya dengan melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- d. Meningkatkan profesionalisme Aparat pengawasannya dan sasaran pengawasannya dalam memegang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasannya.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dalam bidang pengawasannya.

3. Struktur Organisasi

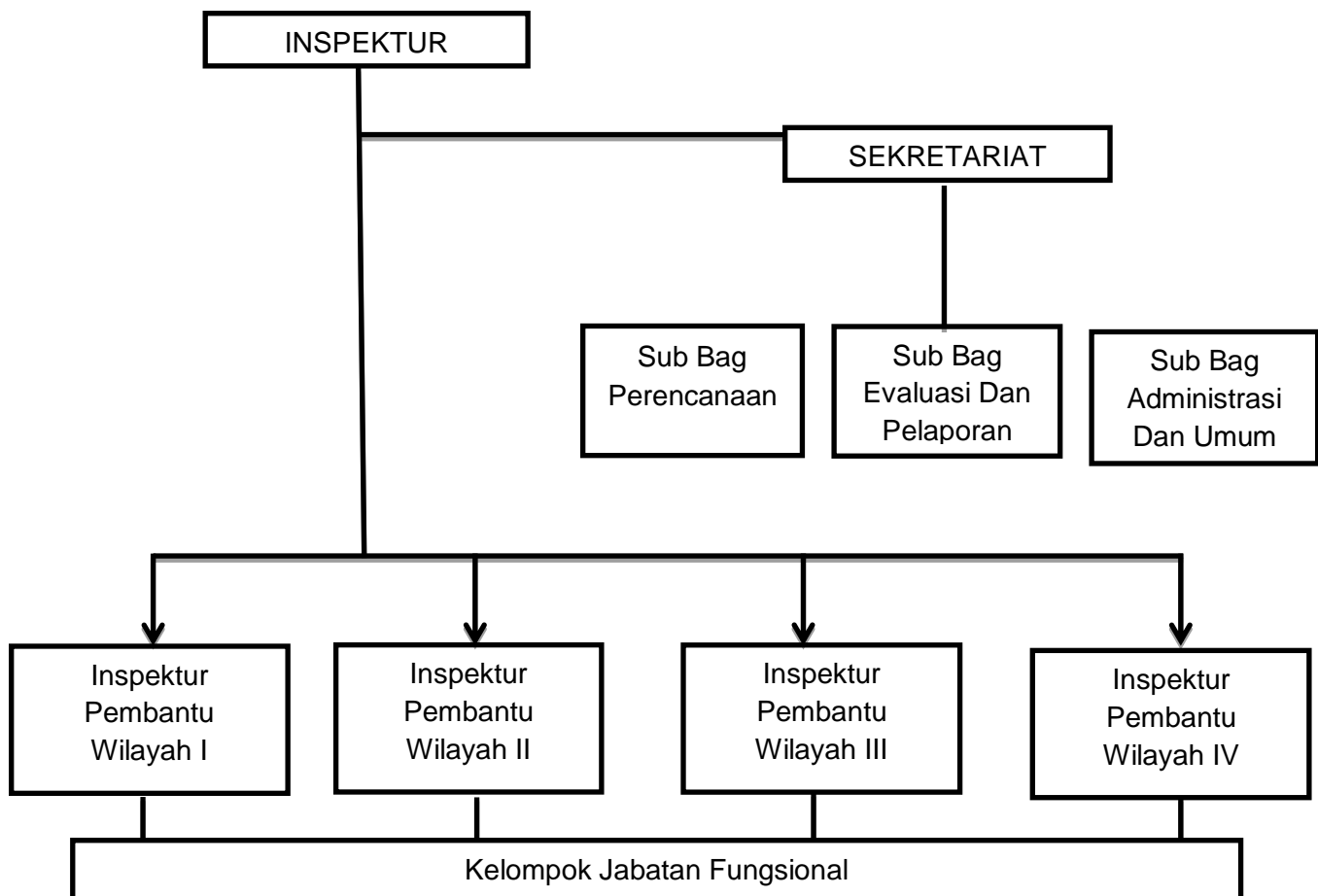
Struktur organisasi merupakan fundamen dari suatu lembaga/organisasi, agar sistem yang diterapkan untuk mengelola suatu kegiatan lembaga/organisasi dapat berjalan dengan baik, maka struktur organisasi tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu sistem. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013, bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Administrasi Dan Umum
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, secara teknis struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Gambar 1.2. Struktur Organisasi

Gambaran struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gowa



Sumber : data diolah dari hasil penelitian 2018

4. Tugas Dan Fungsi

Meninjau data sekunder yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Gowa, diketahui bahwa aparat Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Peraturan

Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Gowa.

1. Inspektur

Inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2012, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, adapun tugas Inspektur sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat,

pembinaan aparatur Negara/daerah, serta kesekretariatan Inspektorat.

- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan.
- d. Mengkomunikasikan kepada para pemimpin unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan serta pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT).
- g. Membina dan mengarahkan sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat.
- i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat.
- j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Inspektorat.

- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Inspektorat Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyaampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah.
- c. Penyusunan, penginventarisan dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, surat menyurat dan rumah tangga.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat Kabupaten.
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
- g. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan penerapan pengawasan Melekat (WASKAT) dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Inspektorat Kabupaten.
- j. Menilai prestasi kerja para Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

- k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagian-bagian dari sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Inspektorat meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kerasipan, protocol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2012, Kepala sub Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan.
- 3) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 4) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat.
- 3) Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan.
- 4) Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokalan dan perjalanan dinas.
- 5) Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan.
- 6) Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan.
- 7) Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian.
- 8) Mengelola dan melaksanakan urusan umumlainnya.
- 9) Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan penerapan Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Baagin Umum dan Kepegawaian.
- 11) Menilai prestasi kerja staaf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

12) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengeolah, menilai dan melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, kepala sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rician tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Inspektorat Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan.

- 3) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
- 5) Mengkoordinasi penyelenggara perencanaan program dan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten.
- 6) Menginventarisir hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan.
- 8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 9) Meelaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAIKIP, RENSTRA, dan RENJA, serta dokumen perencanaan lainnya.
- 10) Meenilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan baahaan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan
- 2) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub bagian Keuangan
- 3) Penyusunan rencana kegiatan, kebutuhan dan anggaran Inspektorat
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2012, sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkab bahan-bahan dan menyusun rencana kabutuhan anggaran dilingkungan Inspektorat kabupaten sebagai pedoman pelaksana tugas.
- 2) Membuat rencana oprasional program kerja sub bagian.
- 3) Membuat daftar usulan kegiatan.
- 4) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian..
- 5) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melaksanakan perbendaharaan keuangan.

- 7) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan..
- 8) Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran..
- 9) Mengelola dan meelaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- 10) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- 11) Meleksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas.
- 12) Melaksanaakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah 1

Inspektur pembantu wilayah 1 dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan kasus-kasus pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Inspektur pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah I.
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pengawasan pada wilayah I.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah I.
- d. Penginventarisan hasil temuan aparat pengawas.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I.
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I.
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.

- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.
 - i. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut.
 - j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I.
 - k. Meneliti prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II di pinpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah II.
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah II.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah II.
- d. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah II.
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan ddi bidang pengawasan dan pemerikaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan reencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II.
- d. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemerriksaan pada wilayah II.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintaahan, dan kemasyarakataan pada wilayah II.
- f. Pelakukan pemantauan daan evaaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Darah di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.

- h. Mengkoordinasi dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.
 - i. Melaksanakan aataau/dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiraan data tindak lanjut/
 - j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II
 - k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III di pimpin oleh seorang Inspektur Pemabntu, mempunyai tugas pokok membina, megkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintaahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2012, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah III.
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah III.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penialaian tugas pengawasan pada wilayah III.
- d. Penginventarisan hasil temuan aparat pengawasan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah III.
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksana tugas.
- c. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III.
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyaarakatan pada wilayah III.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.

- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III.
 - i. Melaksanakan atau/dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut.
 - j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III.
 - k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus-kasus pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2012, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah IV.
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah IV.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penialaian tugas pengawasan pada wilayah IV.
- d. Penginventarisan hasil temuan aparat pengawasan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksana tugas.
- c. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV.
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyaarakatan pada wilayah IV.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.

- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV.
- i. Melaksanakan atau/dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut.
- j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV.
- k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarakan melalui *contact person* kepada Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 15 Juli, sampai dengan batas akhir pengambilan 05 Agustus. Dari 35 koesioner yang disebarakan, 32 koesioner yang kembali dan 3 koesioner yang tidak kembali.

Tabel 1.4
Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Presentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	13	40,62%
2. Perempuan	19	59,37%
Umur :		3,1%
21-25	1	28,12%
26-30	9	56,25%
31-35	18	12,5%
36-40	4	
Tugas/Jabatan:		
<i>Account Representative</i>	16	50%
Pelaksana	17	53%
Pendidikan :		
D3	1	3,1%
S1	26	81,25%
S2	5	15,62%
Lama Bekerja :		
1-5	3	9,37%
6-10	17	53,12%
11-15	8	25%
16-20	4	12,5%

Sumber : Data diolah dari hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan pada tabel 1.4 mengenai data demografi responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki laki sebanyak 19 orang (59,37 %) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (40,62 %). Ini berarti bahwa pegawai laki-laki pada Kantor Inspektorat lebih dibutuhkan. Proporsi responden terbesar berkisar pada kelompok umur 31-35 tahun yaitu sebesar 18 orang (56,25 %) karena pada usia tersebut merupakan usia kerja yang produktif, sedangkan responden terkecil pada kisaran 21-25 tahun sebanyak 1 orang (3,1 %).

Jabatan Responden sebagian besar adalah pelaksana dengan jumlah 17 orang (53 %). Selain itu, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada tingkat S1 yaitu sebanyak 26 orang (81,25 %). Responden yang lama bekerja lebih dari 10 tahun merupakan responden yang terbesar yaitu sebanyak 17 orang (53,12%). Hal ini berarti bahwa kinerja karyawan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa cukup baik karena loyalitas karyawan pada perusahaan tersebut.

2. Hasil Pengujian Analisis

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Spearman correlation* dan perhitungan menggunakan *SPSS 16.0 for windows*. Syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak

diukurnya. Untuk hasil perhitungan *Spearman correlation (output-nya)* sebagaimana terlampir.

Dalam penelitian ini, terdapat 15 item pernyataan, dimana seluruh item pernyataan dikatakan valid karena telah memenuhi syarat $r_{hitung} \geq r_{kritis}$ dimana $r_{kritis} = 0.3$. Rincian pengujian validitas dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 1.5
Uji Validitas Profesionalisme (X1)

No. Butir Instrumen	Koofesien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0,729	0,3	Valid
2	0,809	0,3	Valid
3	0,881	0,3	Valid
4	0,859	0,3	Valid
5	0,665	0,3	Valid

Sumber : Out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Table 1.6
Uji Validitas Aparat Inspektorat (X2)

No. Butir Instrumen	Koofesien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0,832	0,3	Valid
2	0,871	0,3	Valid
3	0,858	0,3	Valid
4	0,872	0,3	Valid
5	0,722	0,3	Valid

Sumber : Out put SPSS 16,0, For Windows, 2018

Table 1.7
Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No. Butir Instrumen	Koofesien Korelasi (r)	Nilai Batas Korelasi (r)	Keterangan
1	0,747	0,3	Valid
2	0,856	0,3	Valid
3	0,889	0,3	Valid
4	0,796	0,3	Valid
5	0,569	0,3	Valid

Sumber : Out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Berdasarkan table 1.5, 1.6 dan 1.7 tersebut menunjukkan tingkat validitas dari instrument yang digunakan sangat bagus. Dengan demikian 15 item instrument dapat melanjutkan pengujian berikutnya.

b. Uji Realibitas

Pengujian realibilitas (keandalan) dilakukan setelah pengujian validitas dan hanya dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang valid saja. Berdasarkan hasil pengujian validitas terdapat 15 pernyataan yang valid, maka pernyataan tersebut dapat diuji reliabilitasnya. Uji realibilitas berfungsi untuk menguji apakah item pertanyaan didalam kuesioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya realibitas instrument, teknik pengujian reabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan menunjukkan reliabel bila koefisien alphanya (α) lebih dari 0,60 artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian.

Semakin besar nilai koefisien reabilitas, semakin reliabel pula data tersebut. Tidak terdapat batasan yang disepakati untuk itu, namun pada umumnya nilai koefisien realibilitas yang dapat diterima adalah 0,60 keatas. Hasil dari pengujian reliabel data untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini yakni Profesionalisme, Aparat Inspektorat dan Kualitas laporan Keuangan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Table 1.8
Uji Realibitas

Variabel	Koefisien Realibitas (α)	Nilai Batas Alpha (α)	Keputusan
Profesionalisme (X1)	0,848	0,60	Reliabel
Aparat Inspektorat (X2)	0,888	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,831	0,60	Reliabel

Sumber : Out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.8 tersebut diatas menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai *alpha cronbach's* pada variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas nilai 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrument pernyataan koesioner menunjukkan kehandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

3. Perhitungan Koefisien Regresi

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.9
Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.605	.971		1.653	.109		
Profesionalisme	.267	.155	.274	1.719	.096	.124	8.051
Aparat	.648	.149	.692	4.348	.000	.124	8.051

a. Dependent Variable:

Kualitas

Sumber : out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (Profesionalisme dan Aparat Inspektorat) terhadap variabel dependen yaitu (Kualitas Laporan Keuangan). Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,065 + 0,267 X_1 + 0,648 X_2 + e$$

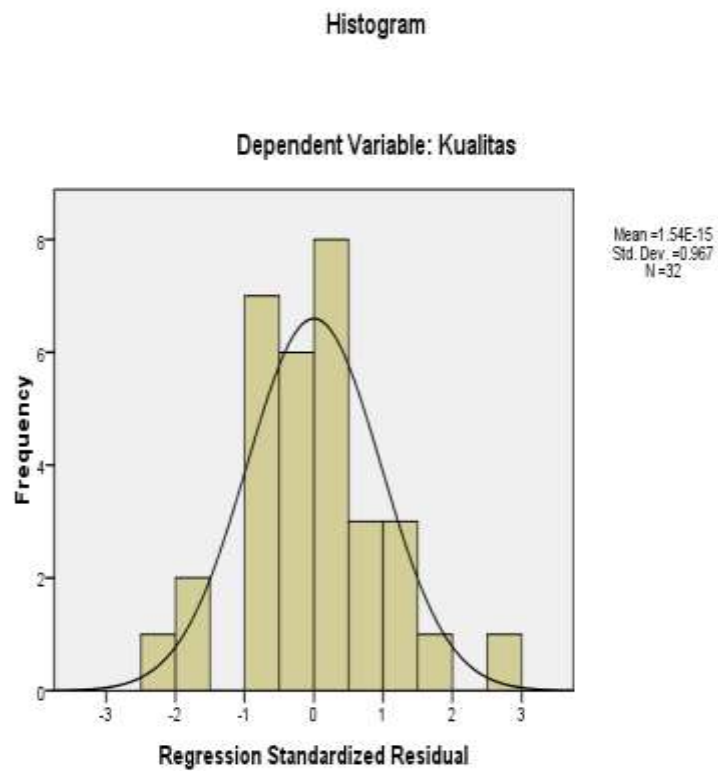
1. Konstanta sebesar 1,065 artinya jika Profesionalisme (X_1), Pengetahuan Aparat Inspektorat (X_2) nilainya 0,648, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) nilainya adalah 1,065 . Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1,065 artinya tidak ada perubahan profesionalisme .
2. Koefesien regresi profesionalisme (X_1) sebesar 0,267 artinya pada variabel profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)
3. Koefesien regresi untuk variabel pengetahuan aparat inspektorat (X_2) sebesar 0,648, dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan aparat inspektorat (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independent keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.

Gambar 1.3



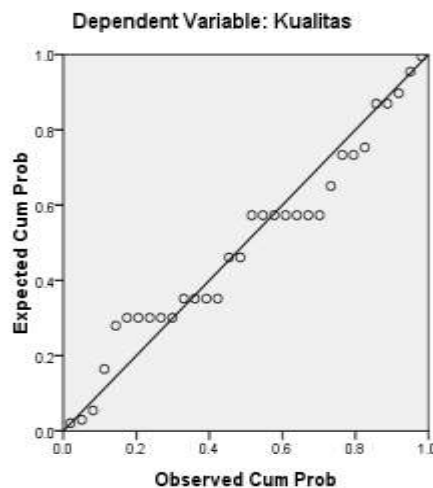
sumber: Out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal.

Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 1.4

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

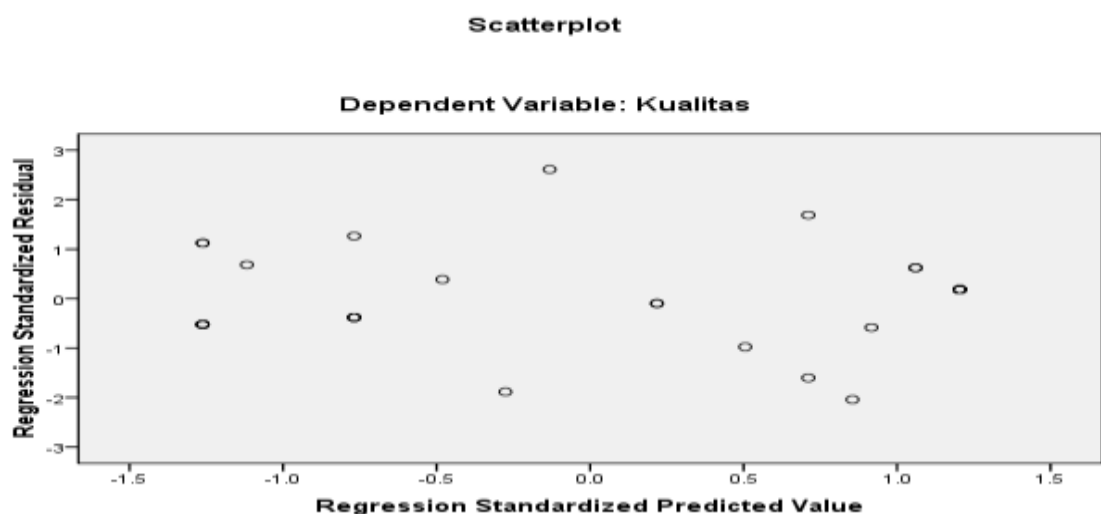
Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Normal P-P Plot* menunjukkan bahwa titik-titik (dot) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal walaupun beberapa titik-titik agak menjauh diigaris diagonal, ini menunjukkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat asumsi normalitas. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar Scatterplot, apabila ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Regresi yang baik bebas dari heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139).

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.5



Sumber : Out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Test-t)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maka dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_a: \beta = 0$: secara parsial (individu) mempunyai pengaruh positif dan signifikan dari Pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_0: \beta \neq 0$: secara parsial (individu) tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan dari Pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan.

Kriteria Pengujian:

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

$t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut

Table 1.10

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.605	.971		1.653	.109		
Profesionalisme	.267	.155	.274	1.719	.096	.124	8.051
Aparat	.648	.149	.692	4.348	.000	.124	8.051

a. Dependent Variable:

Kualitas

Sumber out put SPSS 15,0 For Windows, 2018

Dari tabel 1.9 diatas dapat dilihat hasil pengujian menunjukan bahwa variabel:

1. Profesionalisme (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). uji t dapat dilihat pada table 1.9 yaitu nilai t dengan nilai pembilang $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1.699. pada table 1.9 profesionalisme $t = 1.719$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1.719 > 1.699$, maka H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti Profesionalisme Aparat Inspektorat tidak berpengaruh tapi berkaitan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dikarenakan nilai signifikan $0,096 > 0,05$.

2. Aparat Inspektorat (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). uji t dapat dilihat pada table 1.9 yaitu nilai t dengan nilai pembilang $df=n-k-1=32-2-1=29$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1.699. pada table 1.9 Aparat Inspektorat $t=4,348$, nilai $t_{hitung}>t_{tabel}$ yaitu $4,348>1.669$, maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan nilai signifikan $0,000<0,05$.

b. Uji Simultan (Test-F)

Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila $F_{hitung}< F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya Apabila $F_{hitung}> F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji simultan:

Table 1.11
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1Regression	106.517	2	53.259	144.322	.000 ^a
Residual	10.702	29	.369		
Total	117.219	31			

a. Predictors: (Constant), Aparat, Profesionalisme

b. Dependent Variable:

Kualitas

Sumber, out put SPSS 16,0 For Windows, 2018

Dari uji F, didapat F_{hitung} sebesar 144,322 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan. Hasil F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Diketahui bahwa F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 144,322, lebih besar dari F_{tabel} pada signifikansi $\alpha = 0,05$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima..Hal ini menunjukkan bahwa Profesionalisme (X_1), dan Aparat Inspektorat (X_2) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil uji t, profesionalisme mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,096. Artinya, variabel ini tidak berpengaruh tapi berkaitan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus mengartikan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme aparat inspektorat maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di reviu. Hasil jawaban responden pada koesioner menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki peran yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas reviu dan pembinaan aparat inspektorat itu sendiri terhadap setiap SKPD yang berdampak langsung pada hasil laporan kualitas LKPD kabupaten gowa.

Melihat kembali dari hasil jawaban responden diketahui bahwa profesionalisme yang dapat dicerminkan dalam banyak hal, seperti menyelesaikan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan, dan kemampuan untuk memfokuskan pada fakta-fakta yang relevan, maka dari itu setiap profesionalisme harus menggunakan keahliannya dengan cermat, seksama dan juga hati-hati.

2. Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai t hitung pada variabel pengetahuan aparat inspektorat sebesar 4,348 dan lebih besar dari nilai t table sebesar 1,699, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten gowa.

Berdasarkan pada hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah sudah cukup dipahami dengan baik oleh aparat inspektorat. tetapi masih perlu terus dilakukan peningkatan kompetensi maupun pengetahuan agar aparat inspektorat dapat cepat dan tanggap dalam menemukan penyimpangan dan temuan-temuan dalam proses audit disetiap SKPD melalui penelusuran perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran pada setiap instansi pemerintahan, aparat inspektorat dapat mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan seperti itu.

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan daari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telaah dijelaskan paada bab sebelumnya, sertaa akan diuraikan beberapa keterbaataasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

1. Profesionalisme (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). uji t dapat dilihat pada table 1.9 yaitu nilai t dengan nilai pembilang $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1.699. pada table 1.9 profesionalisme $t = 1.719$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1.719 > 1.699$, maka H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti Profesionalisme Aparat Inspektorat tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dikarenakan nilai signifikan $0,096 > 0,05$.
2. Aparat Inspektorat (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). uji t dapat dilihat pada table 1.9 yaitu nilai t dengan nilai pembilang $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 1.699. pada table 1.9 Aparat Inspektorat $t = 4,348$, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,348 > 1.669$, maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini maka peneliti mengajukan saran agar perusahaan tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sample yang lebih banyak agar hasil penelitian dapat di generalisasi, misalnya untuk seluruh aparat inspektorat se Sulawesi-Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, 2011. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat, Jakarta
- Dwiyanto, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Informasi Birokrasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadja Mada University Press. Yogyakarta
- Doni, 2011. *Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Baik Secara Simultan maupun Parsial*
- Effendi, 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*
- Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang
- Hery, 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Murhani, 2011. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Pustaka Belajar
- Mardiasmo, 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2012. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- Moenir, 2009. *Pendekatan Manusia Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Gunung Agung, Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementrian
- Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Puspita, 2012. *Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Basuki
- Rosmiala, 2015. *Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Darma Nusantara
- Rosmawati, 2011. *Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*
- Swandana, 2017. *Review Laporan Keuangan Pemda*. ISBN

- Suwarjono, 2014. *Perekayasaan Pelaporan Keuangan*.BPFF, Yogyakarta
- Siagian, 2009. *Administrasi Pembangunan*.Bumi Aksara, Jakarta
- Subagjo, 2013. *Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Daerah Dan Entitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Skripsi: Universitas Jember*
- Widjaja, 2013. *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal*.Raja Grafindo Persada, Jawa Barat
- Widjaja, 2014. *Otonomi Daerah* 80 *Daerah Otonomi*,Raja Grafindo Persada,Jawa Barat
- Zaki, 2008. *Intermediate Accounting*.BPFE, Yogyakarta

BIOGRAFI PENULIS



Anita S lahir di Lepa-Lepa Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Pada Tanggal 15 Agustus 1995. Penulis adalah anak keempat dari pasangan Suami Istri Bapak **ABDUL MAJID** dan Alm. **HALIMAH**

Selanjutnya Penulis mulai memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di bangku SD Inpres Mandalle Pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 02 Bajeng Barat pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama juga, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMK Negari 01 Limbung Kabupaten Gowa dan berhasil lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2014.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai dengan doa kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa".